

TATA ULANG KEARAH EKONOMI BERKEADILAN

Oleh Didin S. Damanhuri*

*a.l Ekonom Senior dan Pendiri INDEF, Guru Besar Ekonomi-Politik FEM IPB, Ketua Jaringan Intelektual Sosial-Ekonomi Nusantara IPB, Anggota dewan Penasehat Perkumpulan Penulis SATU PENA, Ketua L-KEN (Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara), Pengamat Ekonomi, Tenaga Ahli Lemhannas 2008 – 2022, Menerbitkan 67 buku sampai 2023, terutama tentang Ekonomi dll



Ada Tiga Model Orientasi Pembangunan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang

Pertama, Model Orientasi Pembangunan Ekonomi dimana Pertumbuhan PDB hanya sebagai faktor Indikatif, yakni Pertumbuhan Ekonomi tersebut dicapai melalui Pemerataan (*growth through Equity*). Misalnya Malaysia melalui NEP dengan Kebijakan Pemihakan kpd kaum Bumi Putera Zaman Mahatir (1981 – 2003) atau Jepang dan Taiwan awal2 Pembangunannya melalui UMKM atau Korea Selatan melalui Land Reform..

Kedua, Model Pertumbuhan Ekonomi Bersama Pemerataan (*Growth with Equity*) Zaman Soeharto (1974 – 1978) di Indonesia dengan Pertumbuhan rata2 7,5% bersamaan dengan 8 Jalur Pemerataan, Atau Thailand melalui pembangunan Agro-Industri rakyat scr besar2an

Ketiga, Model Orientasi Pertumbuhan Ekonomi *at all cost* (*GDP Oriented*). Seperti Indonesia di Era Reformasi lewat Privatisasi besar2an (2000 – 2014) dan melalui Utang LN dan pembangunan Infrastruktur fisik besar2an (Tol, Pelabuhan Udara dan Laut, LRT, MRT, IKN etc) (2014-2023). Juga di China lewat Zona Ekonomi khusus. Bedanya di Ina peran Negara Minimum, smntr di China ada Peran Negara Totaliter Komunis yang sngt kuat menjaga Pemerataan dan Pemberantasan Korupsi yang konsisten..

Paradigma Pembangunan yg hanya Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (*GDP Oriented*) (1)

Terjadi “trickle-up” : **bukan** “trickle down effect” seperti jargon pembangunan (berbasis liberalisme), yakni menetesnya hasil-hasil pembangunan ke daerah dan pedesaan serta rakyat

Proses “*Trickle- up*” Sumber-sumber daya dan hasil-hasil Pembangunan itu mengalir dari daerah-daerah dan pedesaan ke kota-kota besar dan ibu kota serta ke para pelaku pembangunan (pelaku bisnis dan elit-elite pendukungnya di Ibu kota & kota-kota besar) di NSB/Indonesia.



Pembangunan yg hanya Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (2)

Trickle Up Juga terjadi dari Indonesia ke pusat-pusat metropolis dunia (ke negara-negara maju dgn pusat-pusat keuangan dunia di New York, Berlin, Paris, London, Tokyo, Beijing dst.)

Sementara daerah-daerah dan pedesaan (dgn SDA dan SDM didalamnya), terjadi :

- »»» Pengeringan Likuiditas Daerah2
- »»» Marginalisasi Ekonomi Rakyat
- »»» Ketimpangan semakin Memburuk



Pembangunan yg hanya Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (3)

- Penyusunan RAPBN & RAPBD (meski dlm era Otda), akan tetap memilih alokasi Fiskal, moneter dan perbankan yg “Sensitif thd Pertumbuhan PDB/PDRB” (makin padat modal & teknologi dan makin rendah Penyerapan Tng Kerja) ==> makin menyulitkan dlm Mensejahterakan Rakyat di Daerah2 & makin Menajamkan Ketimpangan (antar gol.pendapatan, antar Sektor & antar Wilayah)
- Dg Sistem Politik dan Pemilu yg “High Cost”, maka Proses “mningggalkan Orientasi kpd Kesejahteraan Rakyat” makin nyata, apalagi Elit2 (Pusat + daerah2) yg Eksekutif di Pusat & Kepala Daerahnya trpilih dg Politik Uang dan Transaksional. Dus, Pembangunan Nasioinal dan Daerah2 makin tidak demokratis dan makin tidak berkelanjutan (Ekonomi, Sosial & ekologi)...

Pembangunan yg hanya Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (4)

- Di Era Reformasi, UU : BI, Perbankan, Lalu Lintas Devisa, Pasar Modal, dst (yg mrpkn bagian yg memprkuat GDP Oriented) bersifat “Against to Otda, Decentrized Economy and Political democratic”, krn bersifat “Financial Centralism” , shg yg dikorbankan adlh UMKM & Daerah2 yg makin jauh dari Jakarta...
- Infrastruktur (Fisik, Sosial, Ekonomi, Politik, Soft) mendukung / Follow to GDP Orineted yang mngorbankan UMKM dan Daerah2 serta Golongan Pendapatan Rendah baik scr Nasional maupun di internal Daerah tersebut....

Asta Cita Pemerintahan Prabowo tdk secara Tegas adanya *Platform* utk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi & Ketidakadilan Sosial

(Nomor 6 lebih menunjukkan strategi GDP Orinterd “*Trickle Down Effect*” sprt semua orientasi Pemert.Era Reformasi)



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asta Cita

Presiden Prabowo & Wapres Gibran



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan Jalur Pemerataan dalam Pemerintahan Soeharto:

(Dalam Trilogi Pembangunan: Pemerataan, Pertumbuhan dan stabilitas)

- Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).
- Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Pemerataan pembagian pendapatan.
- Pemerataan kesempatan kerja.
- Pemerataan kesempatan berusaha.
- Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
- Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
- Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Mengapa terjadi “Kekecualian” dari gejala umum “trickle- up” di NSB ? (seperti Jepang, Korsel, China, Turki, Malaysia, Thailand dst.)

Karena ada proses “heterodoksi” pembangunan (keluar dari mainstream) dengan ciri-ciri secara makro :

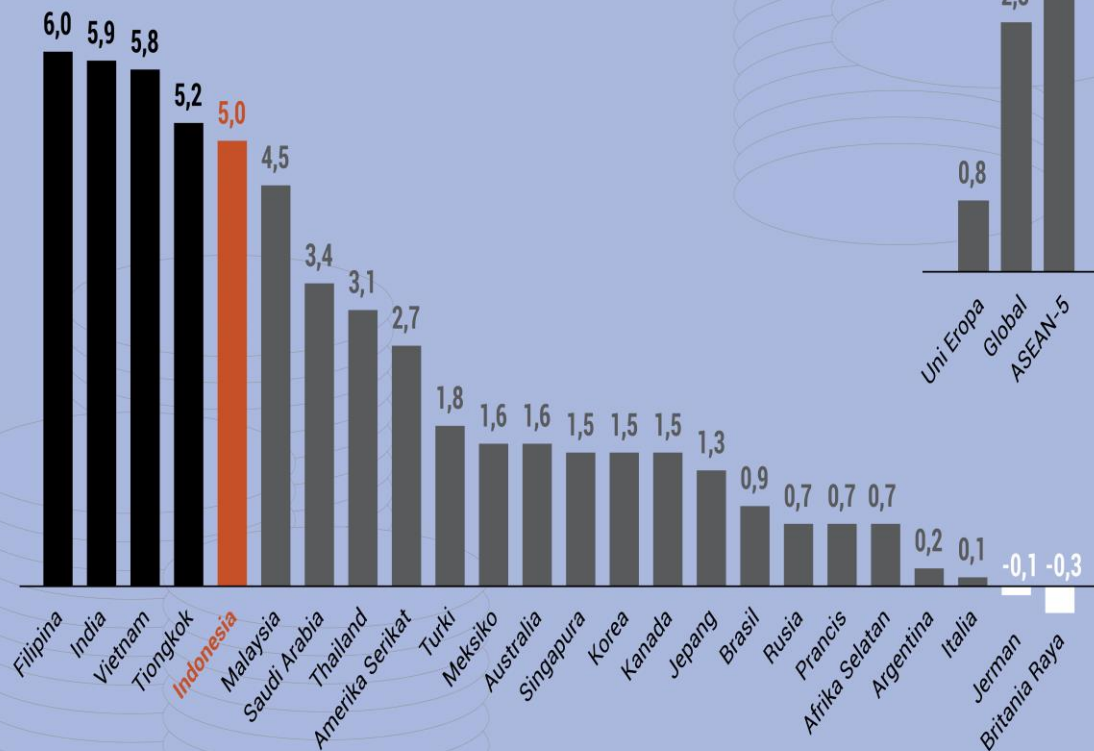
- Ada ideologi nasional yang kuat untuk menghadapi hegemoni negara-negara maju (Advance Capitalist State)
- Peran “Active State” yang mampu mencegah akuisisi kaum modal thd pasar dan mencegah kaum modal untuk mengendalikan negara menjadi alat untuk akumulasi kapital dan kepentingan mereka sendiri
- Adanya independensi kebijakan pembangunan
- Adanya Kemandirian Ekonomi, kedaulatan politik dan Aksi Kebijakan berbasis *Sustainable Development* (ekonomi, social dan ekologi)
- Adanya kemandirian pangan, energi, financial, teknologi dan pelaku bisnis utk Kepentingan Nasional.

Dampak GDP Oriented di Indonesia

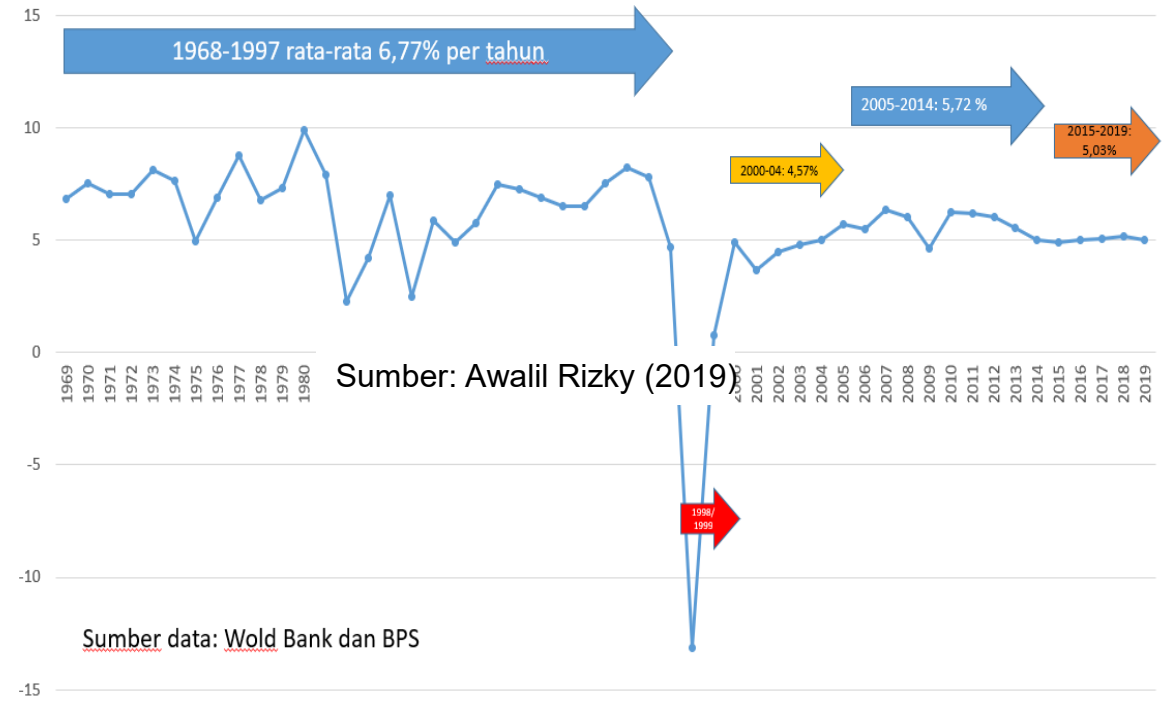
1. KETIDAKADILAN / Ketimpangan : Antar golongan pendapatan, antar daerah, antar sektor dan Penguasaan asset (material power Index meningkat dari 678.000 X thn 2014 menjadi 1.263.000 X , thn 2024)
2. Kebocoran dan korupsi (Era Orba rata2 30% meningkat di era reformasi, antara 30 s/d 57%)
3. Otonomi daerah yang belum mensejahterakan rakyat (baru sekitar 10% dari para Kpl daerah yang dinilai berhasil)
4. PROBLEM EKOSISTEM POLITIK YANG MENYUBURKAN OLIGARKI BISNIS SHG BERDAMPAK Indonesia mengalami “middle income trap”
5. ‘struktur tempayan dalam perewkonomian” menuju “struktur belah ketupat” hampir tidak ada perubahan.

Pertumbuhan Semakin Menurun

Proyeksi Pertumbuhan Negara G-20 & ASEAN-6 Tahun 2023 oleh IMF *% yoy



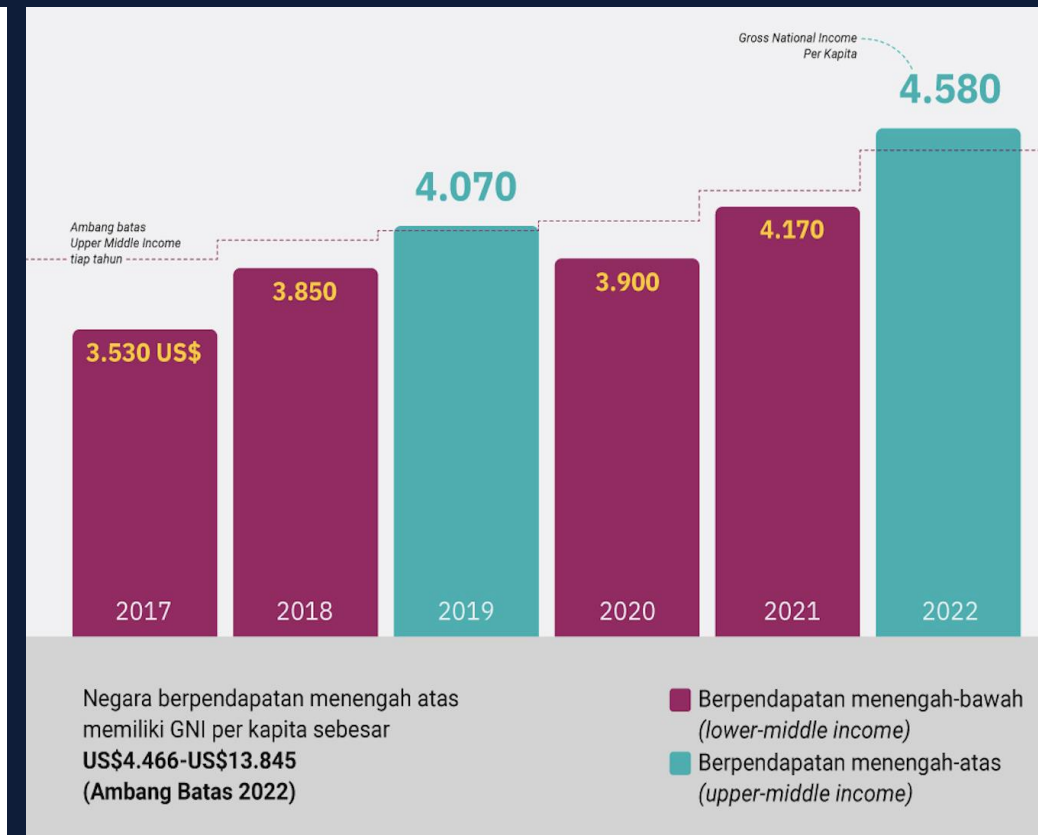
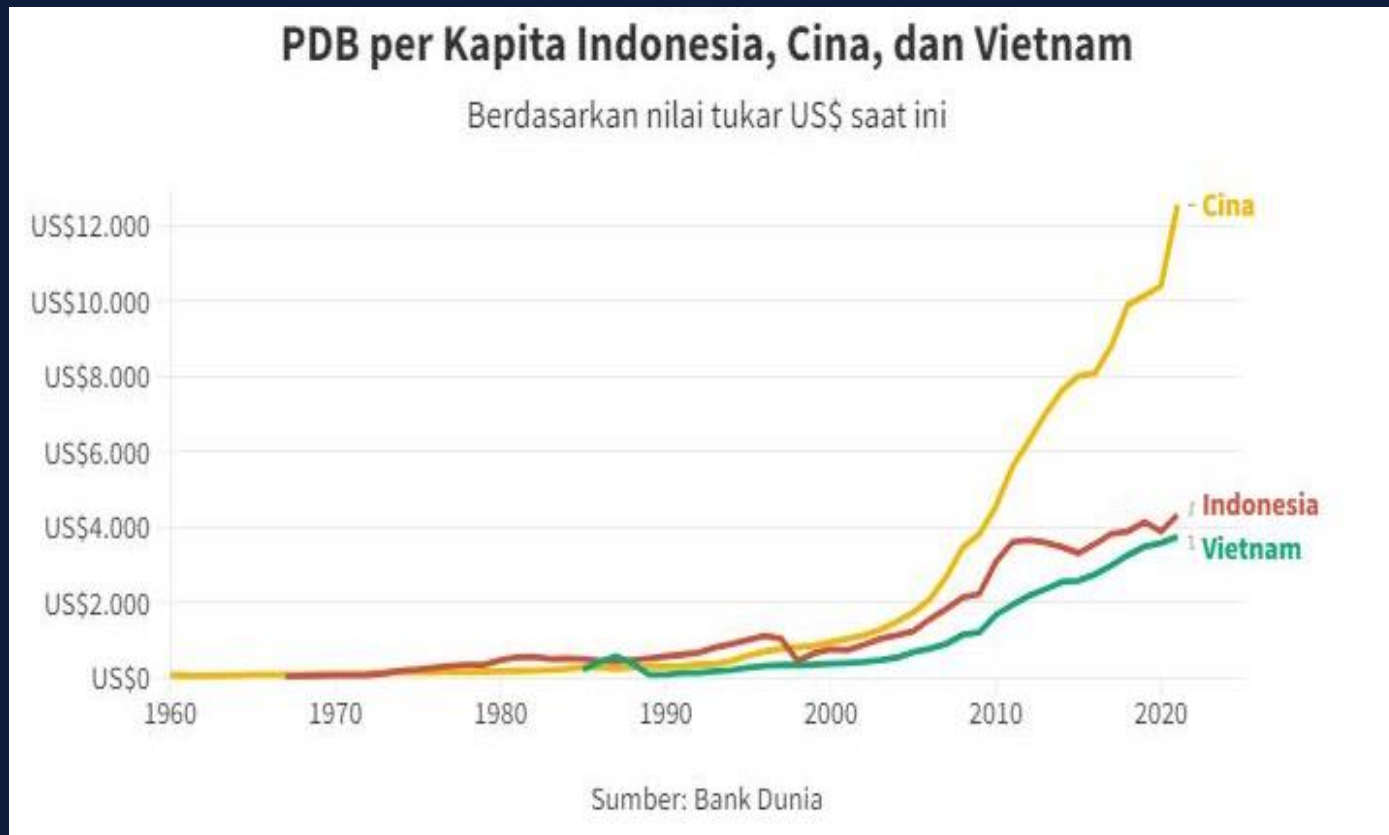
PERTUMBUHAN EKONOMI (PDB) INDONESIA



- Ekonomi Tumbuh 1970-1997 adalah 7,5%
- Ekonomi Tumbuh 2005-2014 adalah 5,72%
- Ekonomi Tumbuh 2015-2019 adalah 5,03%
- Ekonomi Pasca Covid (2023-2025) Adalah rata-rata sek.5,0%
- Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi tinggi, **Bagaimana Caranya?**

PDB Per Kapita naik namun tidak begitu memukau dibandingkan Vietnam dan China, Apa yang Salah?

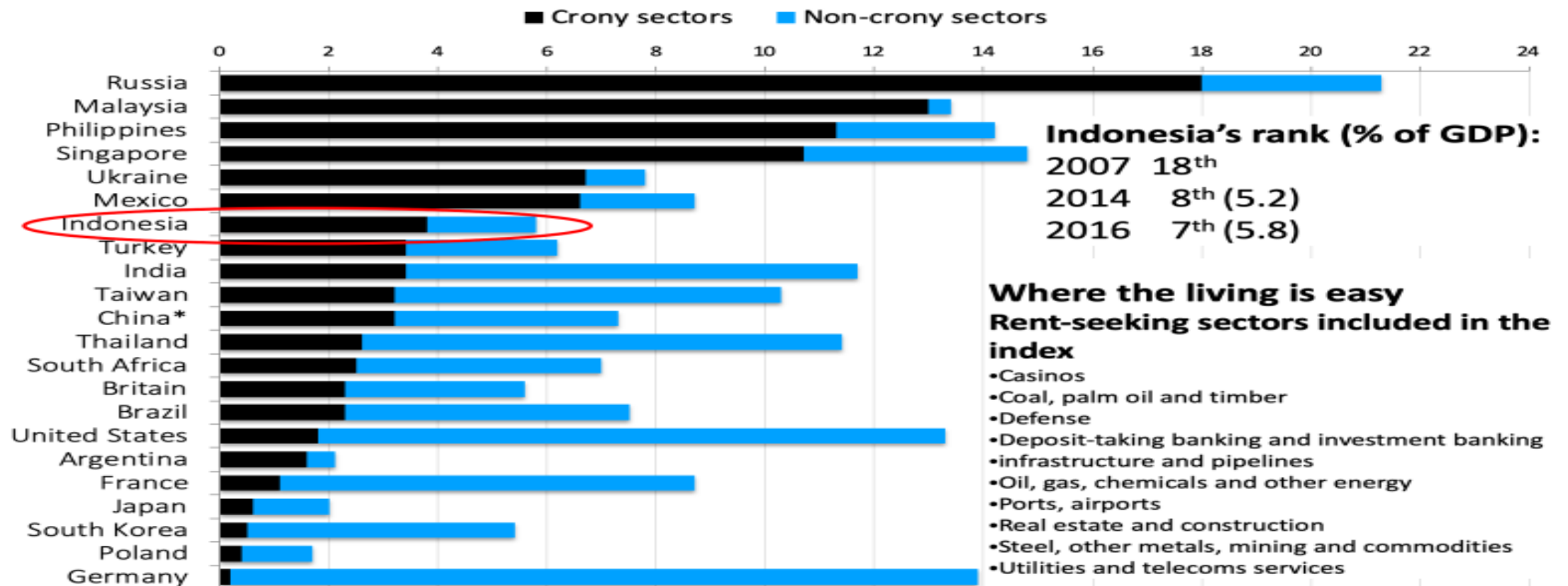
- Perbandingan: PDB per kapita Indonesia meningkat 22 kali lipat Era Orba dari 70 USD (1970) menjadi 1500 USD (2000), namun hanya 3,3 kali lipat di Era Reformasi dari 1500 USD (2000) menjadi 5000 USD (2025).



Masalah Struktural: Pasar Tidak Sehat

The crony-capitalism index

Billionsaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016



*Includes territories.

Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (<http://econ.st/24zXocy>).

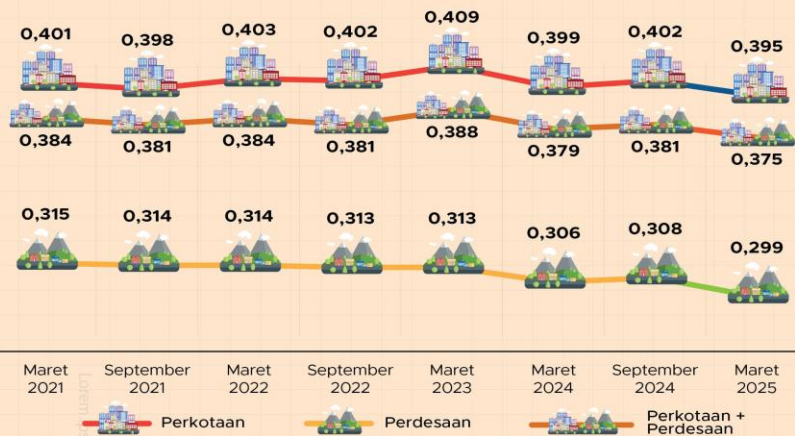
Rasio Gini Pengeluaran

TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK INDONESIA MARET 2025

Berita Resmi Statistik No. 64/07/Th. XXVIII, 25 Juli 2025



Perkembangan *Gini Ratio* Indonesia Periode Maret 2021–Maret 2025



- Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,375. Angka ini menurun 0,006 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,381 dan menurun 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,379.
- Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,395; turun dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,402 dan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,399.
- Gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,299; turun dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,308 dan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,306.
- Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada Maret 2025, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,65 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,64 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,75 persen (Sumber: BPS).
- Catatan: **Tapi Kalau diukur oleh RATIO GINI PENDAPATAN, sebenarnya mendekati 0,5 atau SANGAT BURUK.**

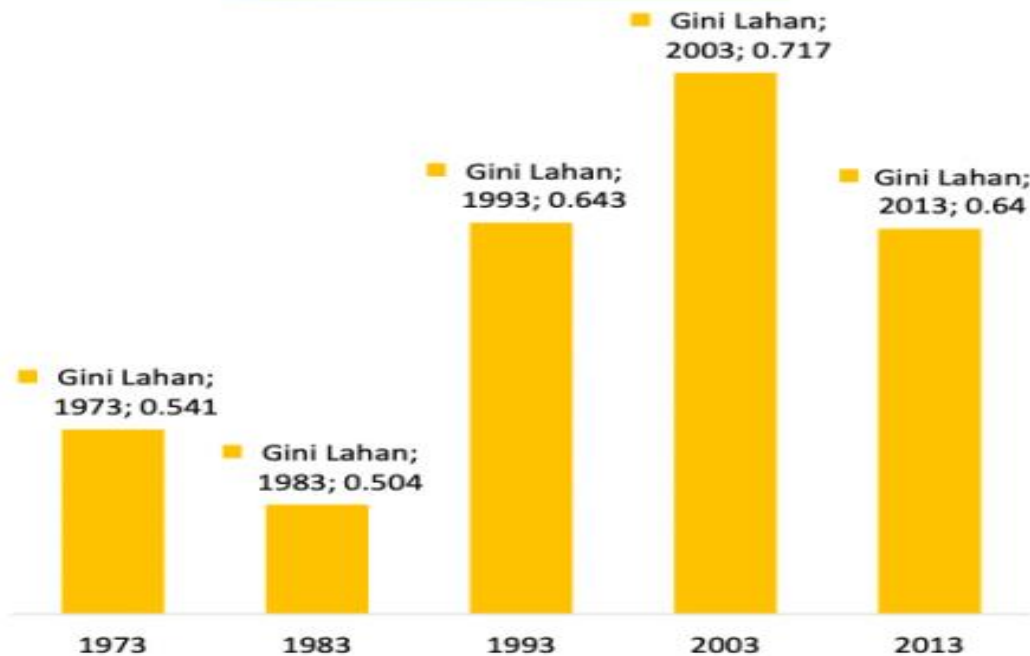
RASIO GINI KEPEMILIKAN ASET LEBIH TINGGI DARI RASIO GINI PENGELUARAN

1% orang menguasai 64% lahan

1,25% rekening menguasai 80,5% total simpanan (2019, LPS)

Rasio Gini Penguasaan Lahan

Total Simpanan di Bank



Tiering Nominal (Jt Rp)	Jumlah Rekening (%)	Nominal (%)
<100	97,9	14,04
100-200	0,95	5,49
200-500	0,64	8,49
500-1000	0,26	7,76
1000-2000	0,13	7,44
2000-5000	0,08	9,79
>5000	0,04	46,99

Sumber: Sensus Pertanian, BPS, Indef, , LPS, Credit Suisse

Catatan : berdasarkan dokumen yang diterbitkan Badan Nasional pada 2022, **rasio gini** pertanahan saat ini berada di kisaran 0,58, yang juga sangat buruk. Perkiraan di lapangan, lebih buruk lagi, diperkirakan rasio Gininya 0,72

KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA PERINGKAT 4

Ketimpangan orang kaya dan miskin di Tanah Air masih tinggi. Ini tercermin dari akumulasi kekayaan segelintir warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan. Bahkan lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse menempatkan Indonesia di urutan keempat dengan disparitas kekayaan tertinggi.

NEGARA DENGAN KESENJANGAN TERTINGGI

Persentase kekayaan nasional yang dimiliki oleh 1 persen warga.



INDEKS KETIMPANGAN MASIH JAUH DARI TARGET

Jurang antara si kaya dan miskin di Indonesia masih tinggi. Dari target 0,36. Gini Ratio Indeks masih di angka 0,397 pada Maret 2016.



PERBANKAN NASIONAL DIKUASAI PEMILIK REKUNING DI ATAS 2 MILIAR



Berdasarkan survei Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

Pada peringkat pertama ditempati Rusia yang mencapai 74,5 persen. Selanjutnya, negara India menjadi peringkat kedua negara tertimpang dengan 58,4 persen. Lalu disusul oleh Thailand yang mencapai 58 persen. Dan Indonesia sebanyak 49,3 persen. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand (Sumber: Credit Suisse)

Indeks Oligarki

Data Indeks Oligarki (Material Power Index):
(Rata2 40 orang Terkaya / PDB per kapita)

Perkembangan indeks oligarki dari 2011 (632.750 X) ke 2023 (1.236.795) (lihat Infografik bbrp Negara 2011-2023 Dimana th.2011 Indonesia kedua terburuk menjadi Pertama Terburuk di dunia).

Implikasi indeks terhadap kebijakan dan ekonomi :

A.I distorsi thd Perundang-undangan (UU Minerba, UU KPK baru, UU MK, UU Omnibus Law Cipta-Kerja dan Kesehatan, Perpanjangan masa Jabatan Komisioner KPK dan MK, Kptsn MK soal pencawapresan Gibran dll yang tdk *comply* thd UUD'45 dengan segala dampaknya thd Perekonomian dan Perpolitikan Nasional (yang sngt menguntungkan dan makin memperkuat OLIGARKI BISNIS maupun POLITIK)

Oligarki

Kondisi di mana sistem politik dikuasai oleh segelintir aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi massa yang masif serta sumber daya finansial untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial.

Tatanan kekuasaan yang memusat, di bawah kendali elit dalam jumlah amat kecil.

Oligarki adalah anak kandung kondisi struktural yang penuh ketimpangan.

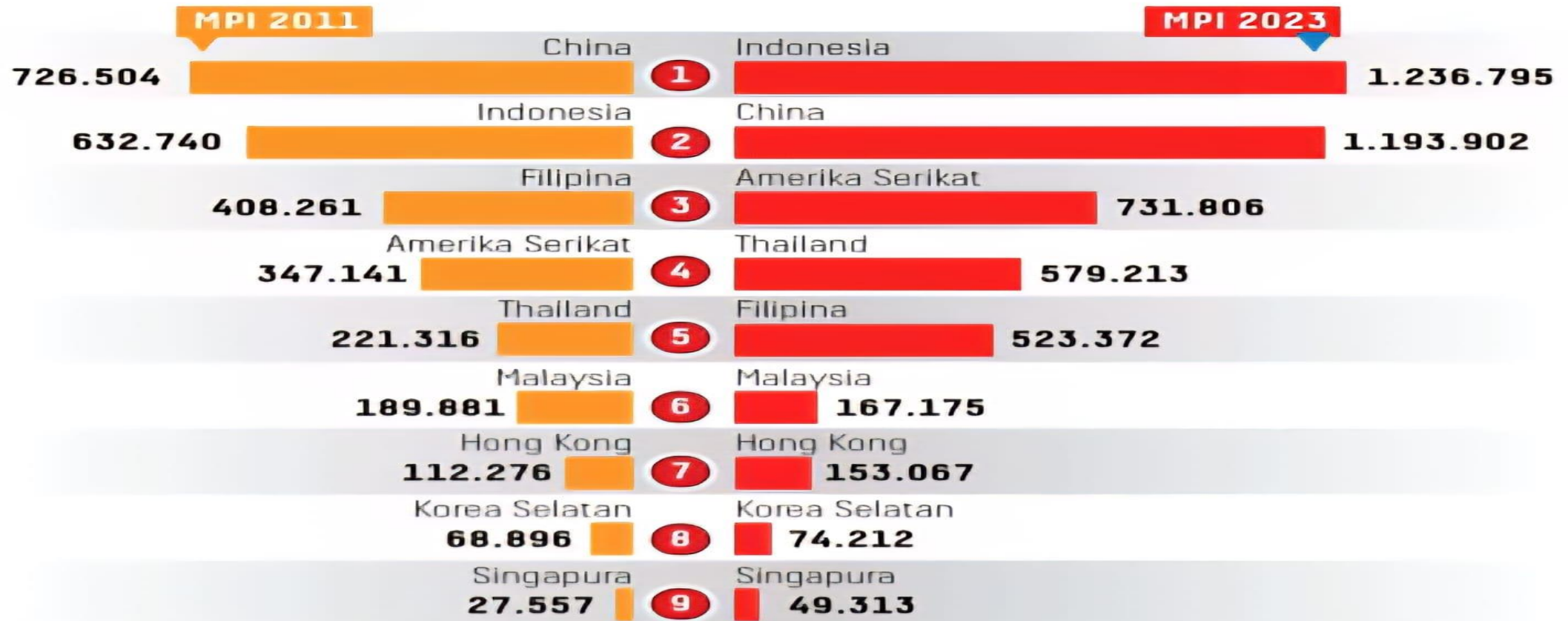
Oligarki semakin dominan ketika para aktor super kaya terlibat dalam politik mempertahankan dan memperbesar kekayaan.



OLIGARKI

Jeffrey A. Winters

Perubahan Material Power Index (MPI) Beberapa Negara (2011 Vs 2023)



Sumber: Forbes, World Bank, Jeffrey A Winters (2013); Diolah Utbang Kompas/TAG



Infografik Perubahan "Material Power Index" (MPI) Beberapa Negara (2011 Vs 2023)

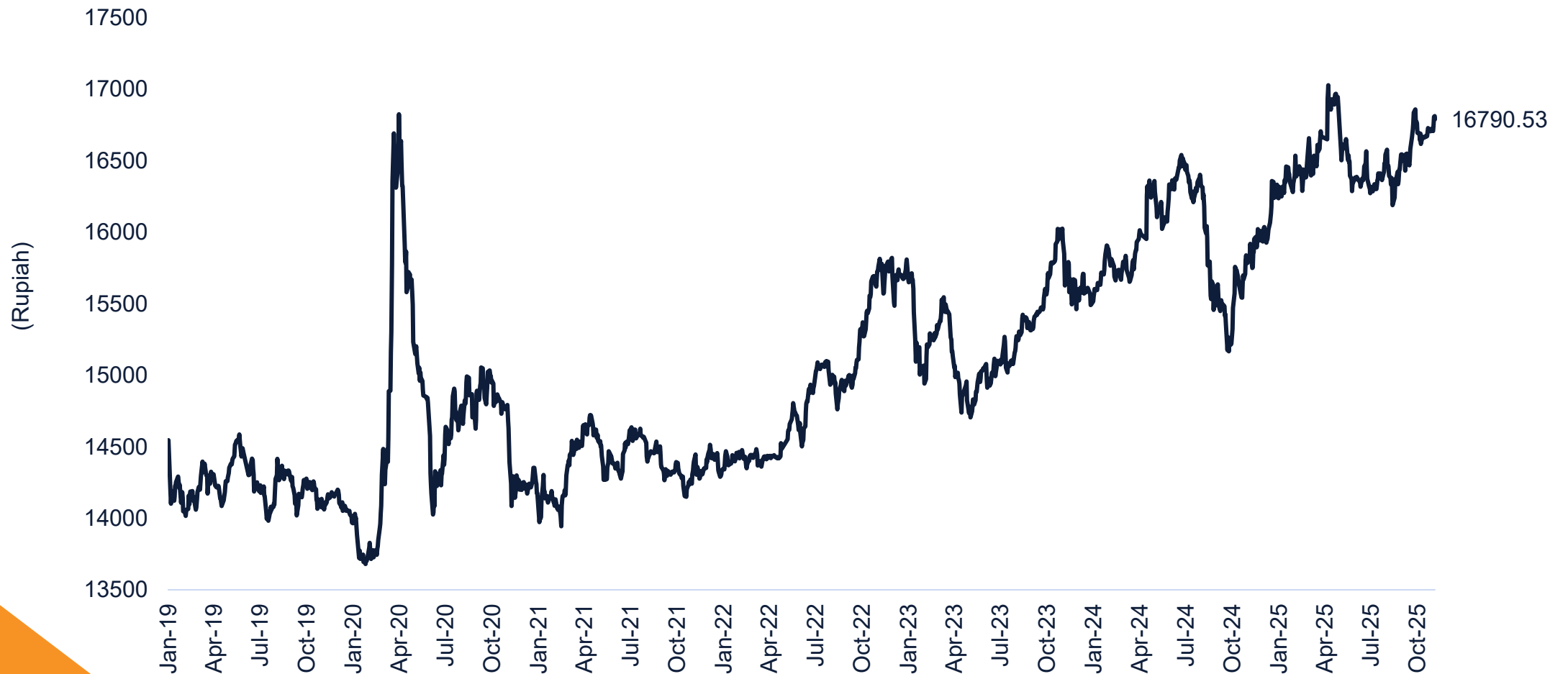
KETIMPANGAN FINANSIAL SANGAT BURUK

0,02% PENDUDUK KUASAI DPK BANK, 36% TAK PUNYA SIMPANAN

KATEGORI ▲	% POPULASI	PEMILIK	ISI SIMPANAN
KAYA BANGET	0.02	53,920	98,462,517,066
MENENGAH	0.80	2,156,800,000	3,464,356,810
MISKIN	63.05	169,982,800,000	5,926,789
MISKIN BANGET	36.13	97,406,480,000	0

Table: CNBC INDONESIA RESEARCH - CNBC INDONESIA INTELLIGENCE UNIT • Source: LPS, DNKI DIOLAH • [Get the data](#) • [Download image](#) • Created with [Datawrapper](#)

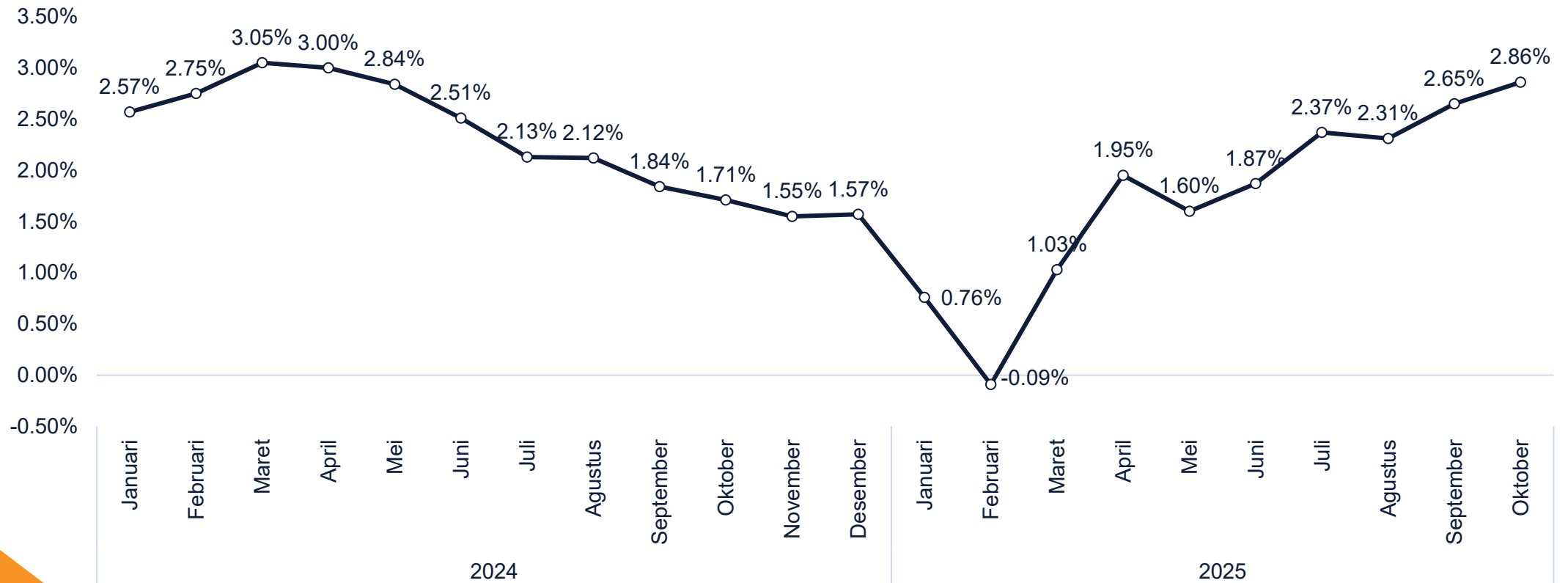
Kurs Rupiah (terhadap USD)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Inflasi


Inflasi (% , y-o-y)



Tiga Langkah Utama Perubahan Teknokratis

1. **Orientasi Pembangunan hrs Lebih Inklusif / Berkeadilan Sosial dalam Paradigma Pembangunan**
2. **Memperbaiki Kelembagaan Institusi Sosial-Ekonomi Seperti BULOG, KPPU Dan KPK**
3. **Tujuan:** Mengurangi ketimpangan (dalam rangka mencapai Pemerataan dan Adil-Makmur utk Semua) serta menciptakan pasar yang lebih sehat.

Revitalisasi Bulog



1967	<p>Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.</p>
1969	<p>Tugas Bulog pada 21 Januari 1969 diubah dari mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru, menjadi melakukan stabilisasi harga beras nasional.</p>
1967	<p>Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog).</p>
2017	<p>Perum Bulog mendirikan Perseroan Terbatas PT. Mitra BUMDes Nusantara (PT MBN).</p>
1998	<p>Ruang lingkup komoditas Bulog dipersempit seiring dengan kesepakatan Pemerintah dengan pihak IMF yaitu hanya menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas pangan pokok lainnya dilepaskan ke mekanisme pasar.</p>
2018	<p>Sampai dengan akhir tahun 2018, sudah terbentuk 27 anak Perusahaan PT MBK (kabupaten) dan PT MBD (desa).</p>

Bulog setelah 2003 menjadi perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, Bulog mempunyai lini bisnis yakni logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.

Peran awal bulog diganti badan pangan nasional UU 18/2012, menjadikan Peran BULOG sbg Stabilisator Pangan dan Penjamin akses Rakyat akan Kebutuhan Pokok yang terjangkau menjadi terganggu Efektivitasnya

Badan Pangan Menurut UU 18/2012 tentang Pangan

- 1** Diatur oleh Peraturan Presiden.
- 2** Bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- 3** Memiliki tugas antara lain:
 - Merumuskan kebijakan pangan.
 - Menjamin ketersediaan pangan nasional.
 - Stabilisasi harga pangan.
- 4** Berwenang menugaskan BUMN maupun kementerian terkait untuk melakukan produksi, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian harga pangan tertentu (setara menteri koordinator).

IMPLIKASI KELEMBAGAAN SETELAH HADIRNYA BADAN PANGAN NASIONAL



KPPU Perlu Diperkuat Kewenangannya

- Pemerintah perlu melakukan berbagai reformasi, khususnya di bidang ekonomi untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh konsentrasi ekonomi pada beberapa pelaku usaha besar.
- Menurut data yang disampaikan, nilai Material Power Index Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, karena aset nasional dikuasai oleh 40 orang terkaya nasional.
- Penguatan KPPU dengan kewenangan penegakan hukum seperti penyadapan perlu dilakukan agar dapat segera mengumpulkan dua alat bukti. Sehingga proses penanganan perkara bisa berlangsung lebih cepat.
- KPPU, sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha dari 10 negara ASEAN yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan/atau sita dokumen dalam proses pengumpulan bukti atas pelanggaran hukum persaingan usahanya.
- KPPU Perlu ditingkatkan Kewenangannya selevel KPK (dg UU lama) dimana fungsinya disamping bagaimana mnyehatkan mekanisme pasar, mencegah dan memberantas Oligopolisasi dan Kartelisasi Perekonomian srt menghilangkan Struktur Oligarki.

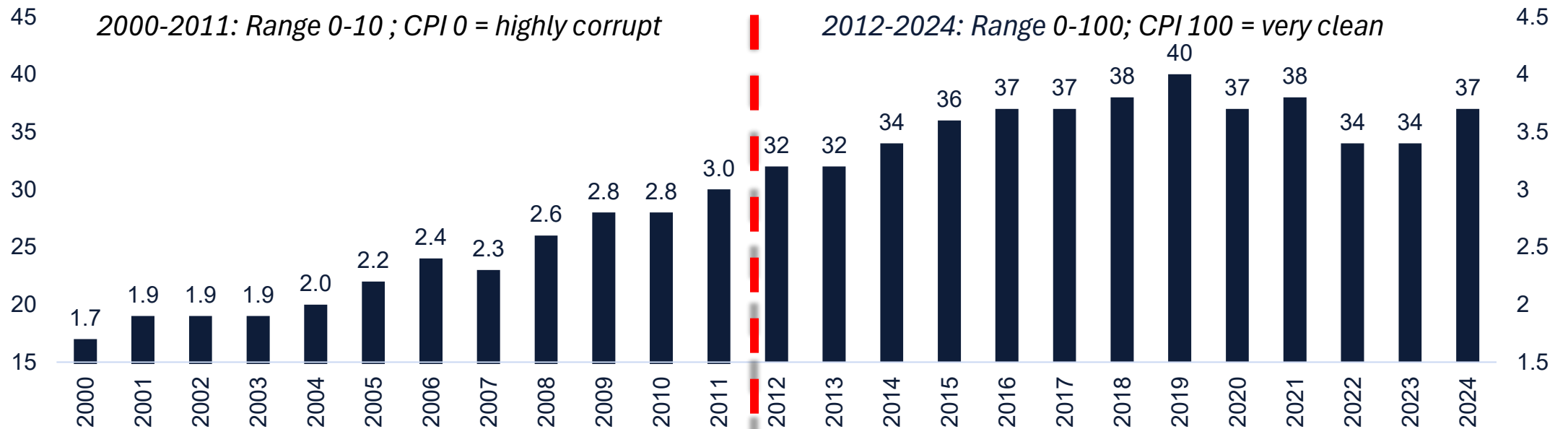
KPPU Tdk Memiliki Kewenangan Penindakan Hukum Yg Kuat



KPK kembali sebagai Komisi Negara Independen

Perubahan Peran KPK: Dari komisi negara independen menjadi lembaga eksekutif.

- Perlu UU KPK yang menempatkan Kembali sbg Komisi Negara yang Independent (sprt dalam UU yg lama)



Notes : Terdapat perbedaan metode penilaian dari rentang waktu 2000-2011 dan rentang waktu 2012-2024

2000-2011: rentang nilai 0-10, kriteria CPI 0 = highly corrupt ; 2012-2024: rentang nilai 0-100, kriteria CPI 100 = very clean

INDEX KORUPSI INDONESIA 2000 - 2024

MASA JAYA KPK 2015-2019 Ketika KPK sbg Komisi Negara yang Independen. KPK DILUMPULKAN 2019-2024, Korupsi Merajalela

Sumber: <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn>, diolah

REKOMENDASI: PERLUNYA REFORMA EKONOMI-POLITIK SECARA MENDASAR & MENYELURUH(I)

- MENGGESER ORIENTASI PEMBANGUNAN YANG TERLALU “GDP ORIENTED” KEARAH “SUSTAINABLE GOWTH” (EKONOMI, SOCIAL & EKOLOGI) WITH EQUITY”
- GDP SEBAGAI FACTOR INDIKATIF YANG HARUS DIKUTI OLEH TUJUAN MENCAPAI KEBERLANJUTAN SCR EKONOMI, SOCIAL DAN EKOLOGI SERTA TARGET PEMERATAAN DENGAN INDIKARTOR YANG KONGKRIT DAN TERUKUR DARI WAKTU KR WAKTU SRT INLINE DG KEBIJAKAN FISCAL, MONETER, PERBANKAN DAN TATA RUANG SCR NASIONAL DAN DAERAH2.
- REFORMA PENGELOLAAN FISCAL DAN MONETER YANG TERLALU TERKONSENTRASI DI KEMENTRIAN KEUANGAN PERLU DIREFORM DENGAN DIPISAH DIMANA BAPPENAS SEBAGAI PERENCANA PEEREONOMIAN NASIONAL SEKALIGUS SEBAGAI PENGELOLA OTORITAS FISCAL BERSAMA KEMENKEU (JG SBG BENDAHARA NEGARA), BANK INDONESIA SBG PEMEGANG OTORITAS MONETER DAN ADA BADAN PENERIMAAN PENDAPATAN NEGARA.

PERLUNYA REFORMA EKONOMI-POLITIK SECARA MENDASAR (II)

- PERLUNYA DIKEMBALIKAN KPK SBG KOMISI NEGARA YNG INDEPENDENT DAN MENAIKAN STATUS KPPU SBG KOMISI NEGARA YG INDEPENDEN SELEVEL KPK. KPK YANG KUAT, INDEPENDENT DAN GOVERNANCE DITARGETKAN UNTUK MENURUNKAN KORUPSI SCR SIGNIFIKAN. SMNTR KPPU DITARGETKAN MENYEHATKAN PASAR DAN PARA PELAKU EKONOMINYA SRT MENCEGAH KARTELISASI DAN OLIGARKI EKONOMI DAN JD PENOPANG PEMERINTAH DALAM MENDORONG PELAKU EKONOMI JADI PEMAIN INDUSTRIAL YANG EFISIEN DAN INOVATIF.
- ADANYA INDICATOR-2 SUKSES OTONOMI DAERAH-2 DG INCINTIVE DAN DISINCENTIVE DALAM ALOKASI FISCAL DAERAH (DAU DAN DAK) SRT DESENTRALISASI FISCAL DAN DILAKUKAN PERANGKINGAN DAERAH-2 YANG SUKSES
- PERLUNYA REVISI UU POLITIK YANG MELARANG SUMBANGAN KPD PARPOL DAN ELITNYA SERAYA MEMBIAYAI SEPENUHNYA OLEH APBN PARPOL YANG MEMENUHI PARLEMENTARY THRESHOLD. KEMUDIAN MEMFOKUSKAN KORPORASI SEBAGAI PEMAIN INDUSTRIAL YANG EFISIEN DAN INNOVATIVE DENGAN MEMPERKUAT BERLAKUNYA UU HLIRISASI YANG MENGUNTUNGGKAN PEREKONOMIAN NASIONAL..

PERLUNYA REFORMA EKONOMI-POLITIK SDECARA MENDASAR (III)

- PERLUNYA KOREKSI STRUKTUR TEMPAYAN MENJADI STRUKTUT BELAH KETUPAT DIMANA TERDAPAT KELAS MENENGAH YANG BESAR DAN KECILNYA PELAKU INFORMAL, MIKRO DAN KECIL :

(1) DENGAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN YANG MASSIF ALA GRAMENT BANK MOHAMMAD YUNUS .

(2) UNTUK MEMPERBESAR KELAS MENENGAH DENGAN ALOKASI PERBANKAN DARI 20% MENURUT UU MENJADI 40-50%. SEMENTARA KORPORASI BESAR JADI PELAKU KELAS GLOBAL YANG KOMPETITIF DENGAN BERBAGAI INCENTIF.

TRIMA KASIH

TRIMA KASIH